

**JURNAL ILMIAH**  
**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (BKSDA DIY) DALAM PENGENDALIAN TERHADAP  
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**



**Diajukan oleh:**  
**RATNASARI WAHONO**

**NPM** : 120511091  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL ILMIAH**

**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (BKSDA DIY) DALAM PENGENDALIAN TERHADAP  
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**



**Diajukan oleh:**

**RATNASARI WAHONO**

**NPM : 120511091**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 20 Januari 2016  
Dosen Pembimbing,**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**



# PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BKSDA DIY) DALAM PENGENDALIAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

Penulis: Ratnasari Wahono  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email:ahyulmma@gmail.com

## *Abstract*

*Endangered fauna is one of the biological elements that has a ecologic function as a buffer of ecosystem sustainability, but today this function is disturbed by exploitation in endangered fauna through illegal trading. The legal issues raised are: first, how the role of Natural Resources Conservation Agency (BKSDA DIY) is played in controlling the illegal trading of endangered fauna in DIY, and, secondly, how BKSDA DIY coordinate with related institutions in controlling the illegal trading of endangered fauna. This research is an empirical legal one, where the data were collected by interviewing the respondents, and the literature study. The research findings show that BKSDA DIY has played its role in controlling the illegal trading of endangered fauna by coordinating with the related institutions, but that role has not been done thoroughly because of the obstacles that came from the internal and external of the BKSDA DIY. For recommendations, BKSDA DIY is supposed to involve the related institutions in controlling the illegal trading of endangered fauna, and the regulations related to it need to be revised.*

**Key Words:** *endangered fauna, BKSDA DIY, illegal trading.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Satwa liar merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa liar), dan dekomposer (zat pengurai), yang masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan<sup>1</sup>. Ketika salah satu dari rantai makanan tersebut punah, maka akan mata rantai yang lain pun bisa terancam punah. Kondisi tersebut dapat mengganggu kelestarian suatu ekosistem. Salah satu masalah yang dapat timbul misalnya adalah kelangkaan terhadap salah satu jenis mata rantai tersebut, yaitu satwa liar.

Masalah mengenai kelangkaan satwa liar disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu memanfaatkan satwa liar untuk dipelihara, diburu secara liar, diawetkan serta diperdagangkan secara melawan hukum. Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari satwa liar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai upaya pencegahan dari perilaku manusia tersebut,

maka dilakukanlah konservasi terhadap jenis-jenis satwa liar (satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi). Konservasi sebagaimana dimaksud meliputi upaya pemanfaatan, pengawetan dan pengendalian terhadap satwa liar.

Dalam rangka mengupayakan konservasi terhadap satwa liar dibentuklah sebuah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pembentukan BKSDA terkhusus dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi dewasa ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan, khususnya terkait keberhasilan sejumlah BKSDA mengungkap dan mengagalkan tindak perdagangan satwa liar yang dilindungi. meskipun telah terdapat banyak pencapaian dari BSKDA dalam pengungkapan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, ternyata tidak membuat kasus mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi kemudian menurun. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengkajian dari peran BKSDA berkaitan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi termasuk kerjasama yang dibangun oleh

<sup>1</sup> Valentinus Darsono. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan. cetakan pertama. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hlm.10.

BKSDA dengan institusi lain yang berkaitan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah dengan potensi kejahatan lingkungan yang cukup tinggi.

## 1.2 Rumusan Masalah

**Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:**

- Bagaimana peran BKSDA DIY dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi?
- Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

- Untuk mengetahui peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Untuk mengetahui koordinasi BKSDA dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi.

## 1.4 Tinjauan Pustaka

- BKSDA DIY

Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY (BKSDA DIY) merupakan BKSDA kelas II yang memiliki tipe B dalam melaksanakan tugas kelembagaannya. BKSDA DIY mempunyai wilayah hukum meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Struktur organisasi BKSDA DIY membagi tugas kelembagaan menjadi 3seksi, yaitu seksi konservasi wilayah, sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari polisi hutan, penyuluh kehutanan dan pengendali ekosistem hutan.

BKSDA DIY memiliki visi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam baik secara in-situ maupun eks-situ. Salah satu misi yang berkaitan dengan pengendalian satwa liar yang dilindungi adalah berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan

pengamanan kawasan konservasi serta pengawasan peredaran satwa liar<sup>2</sup>.

- Satwa Liar yang Dilindungi

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia<sup>3</sup>. Satwa liar sendiri dapat dibedakan menjadi satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. perlindungan terhadap jenis satwa liar tertentu dimaksudkan untuk mencegah kepunahan terhadap jenis tersebut. hal ini menjadi salahsatu upaya pengendalian peredaran yang telah dilakukan Pemerintah yakni dengan membentuk suatu payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya berikut peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada tidak lepas dari hukum internasional yang telah megatur terlebih dahulu terkait pengendalian perdagangan jenis satwa liar tertentu, yaitu melalui *CITES* (*Convention on Internaional Trade in Endangered Species Wildlife Fauna and Flora*). Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dimana peneliti bertitik fokus pada fakta sosial.

### 2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (wawancara dengan responden dan narasumber) dan sumber data

<sup>2</sup>[http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi\\_Misi.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi_Misi.html). Visi Misi KSDA. tanggal akses 15 September 2015pukul 20.30 WIB\

<sup>3</sup> Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, fakta hukum, dan lain-lain).

### 2.3 Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan sejumlah responden dan juga narasumber, serta melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder..

### 2.4 Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Daerah istimewa Yogyakarta.

### 2.5 Responden dan Narasumber

Responden dari penelitian ini adalah BKSDA DIY, POLDA DIY, Polsek Kalibawang, Polsek Sedayu, dan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY)/ *Wildlife Rescue Centre* (WRC). Narasumber dari penelitian ini adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (WALHI DIY), Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY) dan Animal Friends Jogja (AFJ).

### 2.6 Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>4</sup>.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Potret Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DIY

Berdasarkan hasil penelitian sejak tahun 2011 hingga 2015 telah terjadi beberapa kali kasus mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi, namun dari sejumlah kasus tersebut hanya terdapat dua (2) kasus yang diproses secara hukum dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Kasus mengenai perdagangan satwa dewasa ini tidak hanya terbatas pada perdagangan secara konvensional yaitu

dengan memperdagangkan satwa secara terang-terangan di pasar-pasar hewan, namun telah menganrah pada penjualan secara online. Selain itu obyek satwa yang diperdagangkan tidak terbatas pada kondisi satwa satwa yang masih hidup melainkan juga satwa yang telah mati dan diambil bagian-bagian tubuhnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### 3.2 Langkah Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh BKSDA DIY.

Berdasarkan hasil penelitian BKSDA DIY melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi menggunakan empat (4) langkah, yang meliputi:

#### a. Langkah Pre-emptif

Langkah pre-emptif merupakan langkah pengendalian paling dini yang dilakukan BKSDA DIY. Langkah tersebut merupakan langkah pencegahan niat dari suatu tindak pelanggaran hukum berkaitan dengan upaya perdagangan satwa liar yang dilindungi. dalam langkah pre-emptif BKSDA DIY melakukan sosialisasi, penyuluhan, pemberian pendidikan sedini mungkin kepada masyarakat dan para aparat penegak hukum tentang jenis-jenis satwa liar yang dilindungi.

#### b. Langkah Preventif

Langkah preventif merupakan langkah yang bertujuan untuk mencegah, menghancurkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak perdagangan satwa liar yang dilindungi. pada prinsipnya upaya ini masih mirip dengan upaya pre-emptif yakni masuk kategori upaya pencegahan, hanya saja pada langkah ini BKSDA DIY lebih menekankan upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindak pelanggaran hukum kaitannya dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Bentuk-bentuk langkah preventif meliputi:

- 1) Penetapan kuota;
- 2) Pemberian izin;
- 3) Pengecekan dokumen perdagangan;

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Univeristas Indonesia (IU-Press). Jakarta. hlm.21.

- 4) Pengawasan dan pembinaan perdagangan jenis satwa liar.

c. Langkah Represif

Langkah represif merupakan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk mengurangi, menekan dan menghentikan tindak perdagangan satwa liar yang dilindungi. dalam langkah ini BKSDA DIY melakukan beberapa bentuk operasi baik operasi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, maupun operasi yang secara mandiri dilakukan oleh BKSDA DIY. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain:

- 1) Operasi intelejen;
- 2) Operasi fungsional;
- 3) Operasi gabungan; dan
- 4) Operasi yustisi.

d. Langkah Pemulihan

Langkah pemulihan merupakan langkah paling akhir yang dilakukan BKSDA DIY dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi. pada langkah ini terdapat upaya penanganan lebih lanjut terhadap satwa hasil penertiban oleh BKSDA DIY, yakni dengan dilakukan upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut dapat dilepas kembali ke alam liar habitat aslinya (*release*). Pada langkah pemulihan BKSDA DIY akan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan terhadap satwa hasil penertiban, kemudian satwa akan mulai dipisahkan dari yang membawa penyakit tertentu dan yang dalam kondisi sehat. Satwa juga akan masuk tahap-tehap rehabilitasi tertentu, yang mana akan berakhir pada pengambilan keputusan satwa hasil penertiban tersebut dapat kembali dilepas ke alam/ ke habitat aslinya atau tidak. Hal yang menentukan nasib satwa tersebut adalah kondisi fisiknya, dari sejumlah kasus banyak satwa yang tidak dapat dikembalikan ke alam liar/ habitat aslinya akibat menderita cacat permanen seperti menderita kebutaan permanen.

### 3.3 Kelembagaan yang Bekerjasama dengan BKSDA DIY

a. POLDA DIY

Berdasarkan hasil penelitian, BKSDA DIY dan POLDA DIY memiliki kerjasama antar lembaga yang dituangkan dalam sebuah

Memorandum of Understanding (MOU). Kerjasama yang dibangun oleh BKSDA DIY dan POLDA DIY merupakan bagian dari upaya represif yang dilakukan BKSDA DIY. Upaya represif tersebut masuk dalam operasi gabungan, yang biasa dilakukan oleh BKSDA DIY ketika terdapat penindakan atas aksu perdagangan satwa liar yang dilindungi namun pihak yang berperkara kurang kooperatif dalam bernegosiasi dengan BKSDA DIY. Selain itu kerjasamasama yang dilakukan pihak BKSDA DIY dan POLDA DIY juga berkaitan dengan upaya lanjutan dari proses hukum suatu kasus pelanggaran hukum, POLDA DIY merupakan penyidik yang melanjutkan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi agar sampai ke pengadilan. Berdasarkan kajian dari kedua kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang diproses hingga pengadilan dan mendapat putusan berkekuatan hukum tetap, BKSDA DIY dan POLDA DIY kermabli bekerjasama saat pembuktian, dimana biasanya BKSDA DIY akan dihadirkan oleh pihak kejaksaan sebagai saksi ahli atas kasus yang telah diproses oleh pihak kepolisian sebelumnya, namun dalam kedua kasus tersebut pihak kepolisian yang menangani adalah Polsek Kalibawang dan Polsek Sedayu.

b. Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY)

Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta atau yang dikenal dengan Wildlife Rescue Centre adalah suatu tempat rehabilitasi bagi satwa liar Indonesia yang menjadi korban perdagangan dan kepemilikan secara melawan hukum. YKAY merupakan lembaga konservasi non-pemerintah dan non-profit yang berbentuk taman satwa. yang dimaksud dengan taman satwa adalah suatu tempat yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaedah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan,

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, serta rekreasi yang sehat<sup>5</sup>.

Sebagai sebuah lembaga konservasi dengan fungsi penyelamatan YKAY memiliki beberapa kegiatan utama yang bekerjasama dengan BKSDA DIY, antara lain: perawatan satwa, rehabilitasi satwa, *trans-location* satwa, dan program *release* satwa. semua satwa yang berada di YKAY berasal dari penegakan hukum (upaya represif); penyerahan secara sukarela; dan transfer satwa antar lembaga konservasi lain.

YKAY memiliki standar pola rehabilitasi yang sedikit berbeda dengan BKSDA DIY, pada lembaga ini dilakukan pola rehabilitasi yang meliputi tahap karantina (*physycal test; medical check; laboratories check*) kemudian jika satwa masuk kategori *feasible* maka akan masuk tahap *observation cage; oscialization cage; habituation cage; release program; dan monitoring*. Dan untuk satwa yang masuk golongan *unfeasible* akan dilakukan *euthanasia* atau *permanent resident*.

c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY)

BLH DIY merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah DIY di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugasnya BLH DIY melaksanakan beberapa fungsi salah satunya meliputi fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dan konservasi lingkungan<sup>6</sup>.

Dalam hubungan kerja dengan BKSDA DIY, BLH DIY memiliki kerjasama di bidang penyuluhan, diskusi di bidang konservasi, pemberian penghargaan di bidang konservasi lingkungan, serta pengelolaan kawasan esensial di DIY.

d. Animal Friends Jogja (AFJ)

AFJ merupakan salah satu dari organisasi swasta non-profit yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan satwa. meskipun saat ini fokus perhatian AFJ bukanlah terhadap jenis-jenis satwa liar, tetapi AFJ tetap memberi perhatian khusus bagi kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. kegiatan yang rutin dilakukan AFJ adalah kegiatan edukasi, kampanye, penyelamatan, pengontrolan jumlah populasi, adopsi dan juga monitoring.

Dalam hubungan kerjasama yang dibangun dengan BKSDA DIY, AFJ lebih menankan pada kerjasama di bidang monitoring kasus perdagangan satwa. dalam hal ini AFJ memposisikan diri sebagai pelapor yang aktif terhadap kasus-kasus perdagangan satwa maupun kepemilikan satwa liar yang dilindungi. hal ini mengnigat bahwa AFJ merupakan LSM yang belum memiliki kewenangan untuk memlihara, merawat maupun merehabilitasi satwa hasil penertiban oleh BKSDA DIY, sebab izin yang AFJ miliki hanya sebagai LSM biasa saja.

e. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (WALHI DIY)

WALHI DIY merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen non-profit terbesar di Indonesia. Sejak didirikannya WALHI DIY berfokus pada advokasi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber kehidupan yang terancam rusak akibat pembangunan yang tidak mementingkan keberlanjutan sumber daya alam. dalam melakukan advokasi terhadap isu lingkungan WALHI DIY menjalankan empat (4) mandat yakni isu mengenai tata ruang, isu mengenai sumber daya air, isu mengenai kedaulatan pangan, dan isu mengenai bencana ekologis.

Isu mengenai bencana ekologis memang diapndang oleh WALHI DIY merupakan isu yang sangat sensitif hingga saat ini. namu bagi WALHI ketika memandang isu tersebut khususnya mengenai satwa liar seharusnya pandangan masyarakat lebih di *break-down*. Hal ini sesuai dengan pandangan WALHI DIY bahwa sebenarnya upaya perlindungan terhadap jenis atwa liar yang dilindungi tidak

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang *Lembaga Konservasi*.

<sup>6</sup> Pasal 25 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pemangunn Daerah, Badan Lingkungan DIY, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta*.



bisa dilepaskan dengan upaya perlindungan terhadap jenis satwa yang tidak dilindungi juga, sebab baik jenis satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi keduanya mempunyai posisi masing-masing dalam suatu rantai makanan yang menjamin kelestarian suatu ekosistem. Oleh sebab itu WALHI DIY penting untuk melakukan upaya konservasi terhadap kedua jenis satwa liar tersebut, sehingga isu yang dihadapi menjadi lebih luas.

Berkaitan dengan kerjasama yang dibangun WALHI DIY dengan BKSDA DIY, saat ini belum ada kerjasama antar kedua lembaga tersebut. Namun dahulu BKSDA DIY dan WALHI DIY menjalin hubungan yang baik dimana WALHI sering dilibatkan dalam diskusi kaitannya dengan upaya konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi. Meskipun begitu WALHI DIY tetap melakukan upaya pengendalian lewat pemberian pendidikan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk menurunkan sifat eksploitatif masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang terbiasa memanfaatkan satwa liar yang ada di hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

### **3.4 Kendala-kendala BKSDA DIY dalam upaya Pengendalian Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.**

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari BKSDA DIY sendiri dalam melakukan upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
- 2) Keterbatasan dana yang dimiliki BKSDA DIY
- 3) Minimnya sarana prasarana yang dimiliki BKSDA DIY
- 4) Kurangnya BKSDA DIY melibatkan lembaga lain yang bergerak pada isu lingkungan

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar BKSDA DIY sendiri dalam melakukan upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Regulasi di bidang pengendalian perdagangan satwa liar dilindungi yang sudah tidak memadai perkembangan zaman.
- 2) Kurang efektifnya kerjasama yang dibangun BKSDA DIY dengan sejumlah lembaga terkait
- 3) Minimnya kesadaran masyarakat

## **4. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) BKSDA DIY telah berperan dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, hanya saja peran tersebut belum terlaksana dengan maksimal.
- b) Kurang maksimalnya peran BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi disebabkan oleh kendala-kendala yang dimiliki BKSDA DIY baik yang bersifat internal maupun eksternal.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a) BKSDA DIY perlu lebih melibatkan lembaga lain yang berkaitan dengan langkah pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, sebab keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan sarana-prasarana akan teratasi ketika menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga lain yang berkaitan dengan isu yang sama.
- b) BKSDA DIY perlu menerapkan pola-pola rehabilitasi terhadap jenis satwa liar yang dilindungi seperti yang dilakukan YKAY/WRC.
- c) Regulasi terkait pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan revisi dalam rangka mengantisipasi perdagangan satwa liar yang semakin kompleks.

## **5. Referensi**

### **Literatur**

- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (IU-Press). Jakarta.
- Valentinus Darsono. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan. cetakan pertama. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang *Lembaga Konservasi*.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pemangunn Daerah, Badan Lingkungan DIY, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta*.

**Website**

[http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi\\_Misi.html](http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi_Misi.html). Visi Misi KSDA. tanggal akses 15 September 2015pukul 20.30 WIB